

**KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SLEMAN PASCA BERAKHIRNYA MDGs**Beti Nur Hayati¹ dan Muhammad Arif fahrudin Alfana²**ABSTRACT**

The purpose of this study was to describe the specifics of population policy in Sleman post-MDGs. The issues are limited to a few indicators of education, health and poverty reduction. This research is a survey with key data used comes from Bappeda publication, the Central Bureau of Statistics, BKBPMP and Dukcapil Sleman. The results showed that the achievement indicators of education, health and poverty reduction showed improvement from year to year. In 2015, most of these indicators have succeeded in meeting the targets set by the MDGs. In the future, education, health and poverty reduction still remains a strategic issue in the population development in Sleman. Some policies crafted to ensure that the development of population becomes better. Some of these policies are contained in the main points of development to create quality education, the creation of a healthy life and to realize a prosperous society and without poverty.

Keywords: *population policy, the subject of development, Sleman Regency*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pokok-pokok kebijakan kependudukan di Kabupaten Sleman pasca MDGs. Isu yang dibahas terbatas pada beberapa indikator pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan data utama yang digunakan bersumber dari publikasi Bappeda, Badan Pusat Statistik, BKBP MPP dan Dukcapil Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian indikator pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, sebagian besar indikator tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh MDGs. Ke depan, pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman. Beberapa kebijakan disusun agar pembangunan kependudukan semakin baik. Beberapa kebijakan tersebut termuat dalam pokok-pokok pembangunan adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, penciptaan kehidupan yang sehat serta mewujudkan masyarakat sejahtera dan tanpa kemiskinan

Kata kunci: kebijakan kependudukan, pokok-pokok pembangunan, Kabupaten Sleman

¹ Pascasarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. email: arif.fahrudinalfana@yahoo.com

PENDAHULUAN

Mellennium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen bersama dalam bidang pembangunan yang disepakati oleh 189 negara di dunia termasuk Indonesia (Stalker, 2008). MDGs dibentuk sebagai respon dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang terjadi pada tahun 2000 (McArthur, 20014). Keberhasilan MDGs diukur dari target pencapaian dengan menggunakan pendekatan hak penduduk sebagai fokus utama pembangunan. Oleh karena itu, target pembangunan yang ditetapkan cenderung kepada upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan (United Nations Development Programme, 2010).

Tujuan yang akan dicapai dalam MDGs ada delapan. Secara spesifik delapan tujuan tersebut meliputi: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan

kemitraan global untuk pembangunan. Delapan tujuan tersebut memiliki target spesifik yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 (Stalker, 2008; United Nations, 2015).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki riwayat baik dalam pembangunan kependudukan. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY. Nilai IPM di Kabupaten Sleman tercatat selalu berada di atas nilai IPM DIY dan hanya kalah dari Kota Yogyakarta. Pada tahun 2015, nilai IPM di DIY adalah sebesar 77,59 dan tercatat sebagai terbaik nomor dua secara nasional. Adapun pada tahun yang sama nilai IPM di Sleman sebesar 81,2 (Badan Pusat Statistik, 2016). Selain IPM, indikator MDGs merupakan salah satu tolok ukur pembangunan dari sisi kependudukan. MDGs dianggap sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan kependudukan karena di dalamnya diukur indikator-indikator pembangunan manusia. Indikator pembangunan kependudukan tersebut seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (United Nations, 1993).

Pencapaian MDGs di Kabupaten Sleman menunjukkan hal yang

menggembirakan. Sebagian besar target yang telah ditetapkan oleh MDGs telah dapat tercapai bahkan sebelum tahun 2015 (Bappeda Kabupaten Sleman, 2015). Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih jauh dari target yang ditetapkan seperti beberapa indikator dalam pendidikan, kesehatan dan isu lingkungan.

Tulisan ini berusaha untuk memetakan pokok-pokok kebijakan kependudukan di Kabupaten Sleman pasca MDGs. Meskipun demikian tidak semua tujuan MDGs dibahas pada tulisan ini. Penulis hanya membatasi pada masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilihat dari obyeknya merupakan penelitian survey. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda serta dari sumber publikasi lain yang relevan. Data yang dibutuhkan dalam tulisan ini antara lain jumlah penduduk miskin, prevalensi balita kurang gizi/gizi buruk, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, angka

harapan hidup serta data angka kematian ibu dan bayi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Pembangunan Kependudukan pada MDGs di Kabupaten Sleman

Pembangunan milenium telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Artinya tujuan MDGs sudah dapat dievaluasi hasilnya apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau belum. Capaian MDGs di kabupaten Sleman menunjukkan hal yang positif. Beberapa indikator telah menunjukkan performa yang luar biasa sehingga target yang ditetapkan sudah tercapai (Bappeda Kabupaten Sleman, 2015). Dari sisi pembangunan kependudukan, beberapa indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.

Fokus MDGs pada tujuan pertama adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan MDGs tersebut adalah jumlah KK miskin dan prevalensi balita kurang gizi/gizi buruk. Jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman selama tahun 2008-2015 menunjukkan tren menurun. Meskipun pada tahun 2009

jumlah KK miskin menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2010-2015 jumlah KK miskin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah KK miskin kembali mengalami penurunan menjadi 41.023 KK.

Prevalensi balita gizi kurang /gizi buruk merupakan ukuran untuk mengidentifikasi kasus kekurangan gizi pada balita. Adanya kasus ini menjadi indikator adanya kelaparan yang berkaitan erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Kondisi perkembangan proporsi balita penderita gizi buruk di kabupaten Sleman secara umum mengalami penurunan. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014, akan tetapi angka prevalensi gizi buruk kembali mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 0,4 persen atau turun 0,04 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat penurunan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun (2010-2015) adalah sebesar 0,26 persen (Dinas Kesehatan, 2015).

Fokus MDGs pada tujuan kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. Tujuan kedua ini diturunkan ke dalam 1 target yaitu menjamin semua anak-anak dimanapun baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat

menyelesaikan pendidikan dasar pada 2015. Indikator yang digunakan dalam pencapaian target antara lain Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dan angka melek huruf.

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2010-2013, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 dan naik kembali pada tahun 2014-2015 (Gambar 2). Meskipun mengalami penurunan, nilai APM di Kabupaten Sleman telah memenuhi target dari MDGs. Target MDGs untuk APM tahun 2015 adalah sebesar 100 persen, sedangkan di Kabupaten Sleman nilai APM sebesar 103,2 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman telah berada dalam kategori baik.

Indikator pendidikan selanjutnya adalah angka melek huruf. Capaian angka melek huruf di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 belum mencapai target. Target yang ditetapkan oleh MDGs untuk angka melek huruf usia 15 tahun ke atas adalah 100 persen. Sedangkan di kabupaten Sleman, pada tahun 2015 angka melek huruf baru mencapai 98,8 persen.

Meskipun demikian, jika dilihat perkembangannya nilai angka melek huruf di Kabupaten Sleman terus mengalami

kenaikan. Tercatat pada tahun 2010, angka melek huruf di kabupaten Sleman hanya sebesar 92,61 persen dan nilainya terus meningkat sampai tahun 2015. Pada tahun 2015, angka melek huruf sebesar 98,8 persen. Artinya masih sebanyak 1,2 persen penduduk di Kabupaten Sleman yang buta huruf. Hal ini tentu saja perlu untuk mendapatkan perhatian karena kemampuan baca tulis merupakan indikator dasar dalam pendidikan.

Fokus selanjutnya adalah kesehatan. Dalam MDGs, indikator kesehatan sangat beragam macamnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka harapan hidup, prevalensi penduduk yang terkena HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta indikator kesehatan lainnya. Pada bagian ini indikator yang akan dibahas adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan di suatu negara (United Nations, 2013; Alfana, Hanif dan Iffani, 2015). Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani seseorang. Semakin panjang usia atau angka harapan hidup, semakin baik keadaan kesehatan. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008-2015. Tingginya nilai AHH ini menunjukkan

derajat kesehatan di Kabupaten Sleman dalam kategori baik.

SDGs: Babak Baru Pembangunan Pasca MDGs

Pelaksanaan agenda pembangunan milenium telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015. Era pembangunan baru kini telah disusun untuk melanjutkan pembangunan pasca 2015. Beberapa diskusi telah dilakukan untuk mengakomodir pembahasan mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengakomodir beberapa prinsip yang mengerucut pada partisipasi, kesetaraan dan usaha-usaha untuk menguatkan kapasitas dan kemitraan global (United Nations, 2014).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep dari SDGs adalah melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dan SDGs ini merupakan penyempurnaan dari MDGs. Dalam SDGs ini terdapat lima pondasi yaitu manusia, kesejahteraan, kemitraan, planet dan perdamaian.

Tujuan dari SDGs ini diharapkan akan dicapai pada tahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mencapai

kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Secara rinci, tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs pada tahun 2030 ini ada 17 tujuan yaitu :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk
2. Mengakhiri Kelaparan. Mencapai Ketahanan Pangan. Meningkatkan Nutrisi Dan Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
9. Industri. inovasi dan invrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab
13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut
15. Kehidupan di darat
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Pokok-Pokok Kebijakan Kependudukan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman telah diarahkan kepada 4 hal (Bappeda Kabupaten sleman, 2015). Keempat hal tersebut adalah 1) pengendalian kuantitas; 2) peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi; 3) pembangunan keluarga; 4) pengarahannya mobilitas dan 5) pembangunan database kependudukan yang baik. Dalam rangka mencapai pembangunan tersebut maka arah kebijakan yang dibuat harus spesifik dan memiliki tujuan yang jelas.

Menurut dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sleman, arah pembangunan diarahkan pada 6 kebijakan. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;

3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan.
6. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali

Keenam arah kebijakan merupakan pondasi utama dalam menjalankan kebijakan-kebijakan turunan dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman. Arah kebijakan ini sebagai pedoman para pemangku kepentingan untuk menciptakan penduduk berkualitas yang maju, mandiri, sejahtera,

berkelanjutan, dan berbudaya sesuai visi GDPK 2015-2035.

Pembangunan pasca MDGs disebut dengan SDGs atau pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa tujuan SDGs sangat bersentuhan langsung dengan pembangunan kependudukan. Di antara tujuan SDGs tersebut adalah tujuan pertama (tanpa kemiskinan), tujuan ke tiga (kehidupan sehat dan berkualitas) serta tujuan ke empat (pendidikan yang berkualitas). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka kebijakan kependudukan yang tepat menjadi syarat mutlak agar sasaran yang ingin dicapai dapat terpenuhi.

Tiga dari tujuh belas tujuan SDGs yang menjadi isu utama dalam kependudukan di Kabupaten Sleman adalah penanggulangan kemiskinan, pencapaian pendidikan yang berkualitas serta pencapaian kehidupan sehat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka berikut adalah pokok-pokok kebijakan kependudukan yang diterapkan Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan dokumen RPJMD.

Pokok kebijakan dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan peningkatan kualitas ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas

ekonomi terbagi menjadi empat hal, meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan peluang investasi daerah, mengembangkan koperasi, meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,65 persen.
2. Mengurangi kesenjangan/ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien gini. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk koefisien gini adalah nilainya kurang dari 0,4.
3. Menurunkan penganggur terbuka. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk penganggur terbuka adalah sebesar 8,0 persen.
4. Menurunkan keluarga miskin. Target KK miskin pada tahun 2021 adalah sebesar 5,4 persen.

Pokok kebijakan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk rata-rata lama sekolah adalah sebesar 10,48 tahun.
2. Meningkatkan harapan lama sekolah. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk harapan lama sekolah adalah sebesar 15,88 tahun.
3. Meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang PAUD. Target pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 terbuka adalah 78,35 persen.
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Pokok kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan meningkatkan rata-rata usia harapan hidup. Menurut RPJMD, target rata-rata harapan hidup pada tahun 2021 adalah sebesar 74,49 tahun.

SIMPULAN

Era pembangunan baru kini telah disusun untuk melanjutkan pembangunan pasca 2015. Pembangunan yang

mengakomodir beberapa prinsip yang mengerucut pada partisipasi, kesetaraan dan usaha-usaha untuk menguatkan kapasitas dan kemitraan global. Konsep dari SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dan SDGs ini merupakan penyempurnaan dari MDGs. Dalam SDGs ini terdapat lima pondasi yaitu manusia, kesejahteraan, kemitraan, planet dan perdamaian. Arah baru untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, M.A.F., Hanif, W.A.P dan Iffani, M. 2015. Dinamika Mortalitas di Indonesia. dalam *Seminar Nasional Geo Maritim*. Jakarta: Ikatan Geografi Indonesia-Badan Informasi Geografi.
- Alfana, M.A.F., dan Yuanjaya, P. 2016. Pemetaan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sleman. dalam *Seminar Nasional pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Peningkatan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prodi S2 PKLH Universitas Sebelas Maret Surakarta-Ikatan Geografi Indonesia-Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Badan Informasi Geografi 2016
- Bappeda Kabupaten Sleman. 2015. Tujuan Pembangunan Millenium di Kabupaten Sleman Tahun 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
- Bappeda Kabupaten Sleman. 2015. *Grand Design Kependudukan Kabupaten Sleman 2015-2035*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Profil Kesehatan Kabupaten Sleman. Sleman: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- McArthur, J. W. 2014. The Origins of the Millennium Development Goals. *SAIS Review* Vol. XXXIV no. 2 (Summer–Fall 2014). The Johns Hopkins University Press
- Stalker, P. 2008. *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia. Cetakan Kedua*. Jakarta: BAPPENAS dan UNDP.
- United Nations. 1993. *Population and Development Planning*. New York: United Nations.
- United Nations. 2013. *World Mortality Report 2013*. New York: United Nations
- United Nations. 2014. *Delivering the Post-2015 Development Agenda*. New York: United Nations.

United Nations. 2015. *The Millennium Development Goals Report 2015*. New York: United Nations.

United Nations Development Programme. 2010. *Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals*. New York: United Nations Development Programme.